

penyelenggaraan tupoksi di bidang perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Lingkungan eksternal ini meliputi lingkungan sosial dan lingkungan tugas di luar tugas dan kewenangan Dinas Ketahanan Pangan.

- a. Peluang (Opportunities) Peluang yang dimiliki dalam upaya mencapai tujuan pembangunan dapat diidentifikasi sebagai berikut :
 - Tersedianya potensi sumber daya alam
 - Peluang pasar yang masih besar
 - Peran aktif masyarakat
- b. Ancaman / Tantangan (Threats) Upaya dalam melaksanakan tujuan untuk mencapai misi akan menghadapi ancaman/ tantangan dan dapat diidentifikasi sebagai berikut :
 - Rendahnya kesadaran masyarakat akan upaya diverifikasi pangan dan keamanan pangan
 - Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan B2SA
 - Masih lemahnya kelembagaan kelompok tani.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut di atas maka strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pemantauan ketersediaan pangan, distribusi dan stabilitas harga, pembinaan Mutu dan keamanan Pangan serta koordinasi lintas sekto ketahanan pangan.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan

➤ KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran serta dengan memaksimalkan segala kekuatan dan menyembunyikan kelemahan untuk mengisi/ memanfaatkan semua peluang dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjungsabung Timur, kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjungsabung Timur adalah:

1. Meningkatnya pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilitas harga pangan, diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan daerah rawan pangan ;
2. Penguatan Koordinasi lintas sektor Ketahanan Pangan Daerah;
3. Fasilitas Penyediaan Lumbung Pangan, Lantai Jemur dan Sarana Prasarana pendukung kemandirian pangan ;
4. Penyediaan Stok cadangan pangan;
5. Pengawasan dan Pembinaan mutu pangan;
6. Peningkatan Pelayanan Publik, akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dengan RPJMD tercantum pada Tabel berikut :

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026

Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat sejahtera yang bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	1 Peningkatan Ketersediaan, Konsumsi Pangan B2SA dan terjangkau bagi masyarakat	1 Meningkatkan pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilitas harga pangan , diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan daerah rawan pangan	Meningkatnya pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilitas harga pangan	Meningkatnya pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilitas harga pangan , diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan daerah rawan pangan	Meningkatnya pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilitas harga pangan , diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan daerah rawan pangan	Meningkatnya pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilitas harga pangan , diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan daerah rawan pangan	Meningkatnya pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilitas harga pangan , diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan daerah rawan pangan	Meningkatnya pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilitas harga pangan , diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan daerah rawan pangan	Meningkatnya pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilitas harga pangan , diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan daerah rawan pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat program Penanganan Daerah RawanPangan
				Penguatan Koordinasi lintas sektor Ketahanan Pangan Daerah	Penguatan Koordinasi lintas sektor Ketahanan Pangan Daerah	Penguatan Koordinasi lintas sektor Ketahanan Pangan Daerah	Penguatan Koordinasi lintas sektor Ketahanan Pangan Daerah	Penguatan Koordinasi lintas sektor Ketahanan Pangan Daerah	Penguatan Koordinasi lintas sektor Ketahanan Pangan Daerah	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat	

			3	Meningkatkan Sarana prasarana infrastruktur Lumbung Pangan dan sarana pendukungnya serta penguatan cadangan pangan	Fasilitas Penyediaan Lumbung Pangan, Lantai Jemur dan Sarana Prasarana pendukung kemandirian pangan	Fasilitas Penyediaan Lumbung Pangan, Lantai Jemur dan Sarana Prasarana pendukung kemandirian pangan	Fasilitas Penyediaan Lumbung Pangan, Lantai Jemur dan Sarana Prasarana pendukung kemandirian pangan	Fasilitas Penyediaan Lumbung Pangan, Lantai Jemur dan Sarana Prasarana pendukung kemandirian pangan	Fasilitas Penyediaan Lumbung Pangan, Lantai Jemur dan Sarana Prasarana pendukung kemandirian pangan	Fasilitas Penyediaan Lumbung Pangan, Lantai Jemur dan Sarana Prasarana pendukung kemandirian pangan	Program Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
					Penyediaan Stok cadangan pangan	Penyediaan Stok cadangan pangan	Penyediaan Stok cadangan pangan	Penyediaan Stok cadangan pangan	Penyediaan Stok cadangan pangan	Penyediaan Stok cadangan pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat
			4	Meningkatkan Pengawasan Keamanan pangan dan Mutu pangan segar asal tumbuhan/olahan	Pengawasan dan Pembinaan mutu pangan	Pengawasan dan Pembinaan mutu pangan	Pengawasan dan Pembinaan mutu pangan	Pengawasan dan Pembinaan mutu pangan	Pengawasan dan Pembinaan mutu pangan	Pengawasan dan Pembinaan mutu pangan	Program Pengawasan dan Keamanan pangan

Misi 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan pelayanan publik dalam tatanan kehidupan yang nyaman dan harmonis

2	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	2	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Penigkatan Pelayanan Publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Penigkatan Pelayanan Publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Penigkatan Pelayanan Publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Penigkatan Pelayanan Publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Penigkatan Pelayanan Publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Penigkatan Pelayanan Publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
---	---	---	--	---	--	---	---	---	---	---	---	---

2.1.4. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022

1. Struktur Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022 Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022 mengacu pada Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021- 2026. Penetapan Kinerja Tahun 2022 selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 1. Struktur Penetapan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran
1	Peningkatan Ketersediaan, Konsumsi Pangan B2SA dan terjangkau bagi masyarakat	Ketersediaan	2.130	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	Penyusunan dan Penetapan target konsumsi Pangan Perkapita pertahun	78.221.600,-
		Konsumsi Energi	91,6,			Pemberdayaan Masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan Berbasisi Sumber Daya Lokal	146.206.205,-
		Skor PPH				Koordinasi dan sin kronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi perkapita pertahun	46.533.900,-

				Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	83.903.910
					Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Distribusi pangan Pokok dan Pangan lainnya	5.895.000,-
					Pemantauan stok Pasokan dan Harga Pangan	93.755.240
					Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	42.498.910,-
					Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan TTI	34.548.910
				Pengelolaan dan Kesimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan Kabupaten/Kota	21.494.800,-
					Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	118.800.000,-
					Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2.950.000,-
			Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	Penyusunan, pemutahiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	30.549.644,-
				Pengangan kerawanan pangan kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan Kabupaten/Kota	20.120.344,-

				Pengawasan Keamanan Pangan	Pengawasan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1.890.000,-
						Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/kota	37.170.000,-
2	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas kinerja dan keuangan.	Indeks Kepuasan Masyarakat Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Laporan Keuangan sesuai SAP	82 B Sesuai	Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.268.000,-
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.381.000,-
						Koordinasi dan Penyusunan Dok. Perubahan RKA-SKPD	1.345.000,-
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.345.000,-
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.330.000
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.689.800,-
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.828.300,-
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.255.000.299,-
						Pelaksanaan Penata usahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	599.920.000,-
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.080.448,-
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	145.685.806,-
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	204.791.996,-
						Penyediaan barang Cetak dan penggandaan	14.153.300,-

					Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan PerUUan	5.000.000,-
					Fasilitas Kunjungan Tamu	4.000.000,-
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.500.000,-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000,-
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.100.000,-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,-
					Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan listrik	279.000.000,-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	109.450.000,-
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	35.430.000,-
					Pemeliharaan /Rehabilitas gedung	21.000.000,-
				JUMLAH		8.706.890.876,-

2. Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2022
1	Peningkatan Ketersediaan, Konsumsi Pangan B2SA dan terjangkau bagi masyarakat	Ketersediaan Konsumsi Energi	Kkl/Kapita/Tahun	2.130
		Skor PPH	Nilai	91,6,
2	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas kinerja dan keuangan.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	82
		Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	Nilai	B
		Laporan Keuangan sesuai SAP	Nilai	Sesuai

No	Program	Anggaran	Sumber Dana
1	Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	3.802.298.949,-	APBD
2	Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	4.140.053.464,-	APBD dan Dak Fisik
3	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	676.808.475,-	APBD dan Dak Non Fisik
4	Penanganan Kerawanan Pangan	50.669.988,-	APBD
5	Pengawasan Keamanan Pangan	39.060.000,-	APBD
	Jumlah	8.706.890.876,-	

Dalam pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan, terjadi pergeseran-pergeseran yang menyebabkan adanya perubahan pagu anggaran. Namun demikian, perubahan tersebut tidak merubah Perjanjian Kinerja. Pergeseran yang terjadi adalah adanya revisi anggaran Dinas Ketahanan Pangan pada akhir tahun 2022.

Alokasi anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp. 8.645.560.869,- dan setelah pergeseran menjadi Rp 8.706.899.876,- atau ada penambahan anggaran sebesar Rp. 61.330.007,- .

Selanjutnya guna mendukung pencapaian target sebagaimana dimaksud maka didukung dengan program antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan kemandirian Pangan

- c. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- d. Program Kerawanan Pangan
- e. Program Pengawasan Keamanan Pangan.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dibutuhkan pendanaan yang besar. Sumber pendanaan tidak hanya berasal dari APBD II, tetapi perlu ditunjang dari sumber pendanaan lain seperti APBD Provinsi dan APBN. Dukungan pendanaan dibutuhkan untuk memfasilitasi proses koordinasi, supervisi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program/kegiatan. Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut :